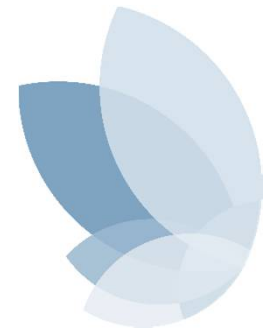


LAPORAN CAPAIAN IS RBTK & *QUICKWINS* DITJEN PERBENDAHARAAN 2020



Transformasi Kelembagaan | Pasti Lebih Baik

1

IS RBTK

DJPb

2

IS 1 Penguatan Budaya Organisasi Kemenkeu: *The New Thinking of Working*

TUJUAN

Mewujudkan budaya kerja yang adaptif, berbasis digital dan berintegritas guna meningkatkan produktivitas dan kinerja Kementerian Keuangan.

Capaian 2020

Integrity Framework

- Terdapat 50 pegawai DJPb yang mengikuti proses Sertifikasi Penyuluh Anti Korupsi (SPAK) tahun 2020
- Terdapat 18 pegawai DJPb yang memenuhi Persyaratan SPAK tahun 2020
- Terdapat 15 Pegawai DJPb yang lulus assesment SPAK tahun 2020
- Dirjen Perbendaharaan menandatangani dan menetapkan KEP-253/PB/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kerangka Penguatan Integritas DJPb
- Integrity Framework. Tim telah melakukan sinkronisasi konsep IF dengan Governance Framework (GF) dengan Inspektoral 7 dan CTO (Agustus 2020)

Open Space

- DJPb telah berkoordinasi dengan Romadan Setjen untuk mewujudkan satellite office pada KPPN Bogor. Diperkirakan akhir tahun 2020 siap untuk digunakan
- Satellite Office di tahun 2021 DJPb merencanakan implementasi pada KPPN Bekasi, KPPN Surakarta, KPPN Malang dan KPPN Klaten. Saat ini telah dilakukan evaluasi potensi dan pemanfaatan ruangan untuk diusulkan
- Penunjukan Unit Piloting. Dit PPKBLU sebagai unit piloting ABW lingkup DJPb
- Penerbitan Juknis ABW untuk pengadaan/ renovasi kantor
- Penetapan Ketentuan Standar Peralatan dan Mesin
- Penyusunan Updating Buku Panduan. Standar desain dan layout Gedung Instansi Vertikal (dalam proses)

Isu Strategis

- Mempersiapkan para pegawai DJPb agar tingkat kelulusan dalam mempersiapkan dokumen persyaratan dan mengikuti uji Sertifikasi Penyuluh Anti Korupsi di era pandemi semakin meningkat
- Komitmen pimpinan dan seluruh pegawai dalam implementasi Integrity Framework DJPb
- Pelaksanaan internalisasi/ sosialisasi Juknis Pelaksanaan Integrity Framework DJPb
- Pelaksanaan money setelah implementasi Integrity Framework DJPb

Next Steps (2021)

- Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) KPK sudah bisa melaksanakan Sertifikasi Penyuluh Anti Korupsi (SPAK) secara Online. Bagi pegawai DJPb yg telah menyelesaikan pelatihan persiapan SPAK dan belum mempunyai sertifikat akan diikutsertakan dalam batch selanjutnya
- Metode penyampaian/pembelajaran secara masif Integrity Framework ke seluruh pegawai DJPb
- Metode evaluasi atas implementasi Integrity Framework DJPb
- Rencana pengembangan aplikasi terintegrasi dalam implementasi Integrity Framework DJPb

IS 11 Shared Service dan Government Platform

TUJUAN

Penyederhanaan proses bisnis pelaksanaan anggaran dengan penggunaan teknologi digital.

Capaian 2020

Shared Service

- Telah dibentuk Tim Adhoc SSC KEP-130/PB/2020. Kickoff 5 Juli 2020
- Telah ditetapkan PMK 204/PMK.05/2020 17 Desember 2020 tentang Piloting Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan APBN melalui Platform Pembayaran Pemerintah
- MoU DJPb dengan PT PLN (Persero) telah ditetapkan tgl 23 Desember 2020. Nota kesepahaman/ MoU DJPb dengan PT Telkom sedang dalam proses penyusunan
- Integration Testing dan UAT dengan TELKOM (29/12/2020) dan PLN (30/12/2020) sudah dilakukan
- Pembayaran gaji Januari 2020 menggunakan Platform Pembayaran Pemerintah telah berhasil dilakukan (23/12/2020)

Kartu Kredit Pemerintah

- Telah dilakukan sosialisasi edukasi kepada seluruh Kanwil DJPb dan KPPN melalui vidcon terkait implementasi KKP Lanjutan pada 9 April 2020
- Telah disusun laporan pemantauan dan evaluasi penggunaan KKP tahun 2019
- Pengembangan/penyesuaian aplikasi Satker (SAS-Modul Silabi dan SAKTI) untuk memenuhi permintaan data DJP
- Berdasarkan PMK No.231/PMK.03/2019, mulai 1 April 2020, Bendahara Satker K/L tidak wajib memungut, memotong, dan/atau menyeter PPh Pasal 22 dan PPN atau PPN dan PPNBM atas penggunaan KKP
- Telah dilakukan survey ketersediaan mesin EDC kepada Satker mitra kerja
- Telah ditetapkan Per-19/PB/2020 pada tanggal 30 September 2020 tentang Uji Coba Mekanisme Pembayaran dan Penggunaan KKP Atas Beban BA BUN
- Sedang dikembangkan/disesuaikan aplikasi Satker (SAS-Modul Silabi dan Aplikasi SAKTI) dalam rangka implementasi KKP Satker BA BUN
- Untuk satker biasa modul KKP sudah implementasi

IS 11 Shared Service dan Government Platform

TUJUAN

Penyederhanaan proses bisnis pelaksanaan anggaran dengan penggunaan teknologi digital.

Isu Strategis

Shared Service

- Sistem elektronik core memerlukan sertifikasi dan TTE tersertifikasi sebagai penguat kepatuhan pada UU ITE
- Terkait common expenses, kelengkapan naskah perjanjian dan penyiapan system baik mitra maupun core membutuhkan waktu tambahan
- Tantangan beban kerja akhir tahun dan penyelesaian milestone

Kartu Kredit Pemerintah

- Pandemi Covid-19 mempengaruhi optimalisasi implementasi penggunaan KKP oleh Satker K/L
- Survei EDC KKP masih berjalan

IS 11 Shared Service dan Government Platform

TUJUAN

Penyederhanaan proses bisnis pelaksanaan anggaran dengan penggunaan teknologi digital.

Next Steps (2021)

Shared Service

- Piloting Common expenses (PLN & Telkom) DJPb & Setjen (Januari 2021)
- Perluasan piloting gaji dan common expenses (PLN & Telkom) Kemenkeu I
- Pengembangan layanan pembayaran tunjkin (DJPb & Sekjen)
- Monev piloting layanan
- Pelaksanaan Program Change management & communication
- Penerapan TTE tersertifikasi dan Ijin operasional sistem Core ke KOMINFO

Kartu Kredit Pemerintah

- Pengujian terhadap aplikasi Satker (SAS-Modul Silabi dan Aplikasi SAKTI) yang telah dikembangkan/disesuaikan dalam rangka implementasi KKP Satker BA BUN
- Implementasi Uji Coba Mekanisme Pembayaran dan Penggunaan KKP Atas Beban BA BUN yang akan dilaksanakan secara bertahap
- Monitoring dan evaluasi penggunaan KKP (Kanwil DJPb/KPPN/ Satker K/L) tahun 2020

IS 13 Pengintegrasian Informasi Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

TUJUAN

Mewujudkan terintegrasinya informasi keuangan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah serta *Business Intelligence* Pemerintah untuk mendukung pengambilan kebijakan fiskal yang komprehensif, serta meningkatkan sinergi keuangan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah.

Capaian 2020

Capaian Utama

- Telah ditetapkan KMK Nomor 5/MK.5/2020 tentang Pembentukan Tim SIKRI Tahun 2020
- Telah dilakukan simulasi Data Transaksi Keuangan pemda yang dikompilasi SIKD menjadi laporan keuangan oleh DJPK, sesuai UND-15/PB.7/2020
- Telah dilakukan pembahasan dalam rapat Dit.ESI, Dit.APK, Dit.SITP, PMO DJPb dan PMO DJPK untuk membahas dan menyeleraskan interkoneksi antar kedua sistem pada tanggal 03 Desember 2020
- Telah disusun rancangan Blueprint dan BDAT SIKRI (setelah melalui pembahasan dengan pihak terkait) telah disampaikan kepada Dirjen Pb melalui ND nomor 1147/PB.6/2020 tanggal 30 Des 2020
- Telah diadakan pelatihan capacity building (SDM) analisis data, teknologi, dan infrastruktur pendukung, dengan mengajak Dit SITP yang bekerja sama dengan Brainmatic dengan topik Training Systems Analysis and Design with UML

Capaian Lain

- Dit. APK telah mengirimkan ND kepada Dit. ESI mengenai spesifikasi data keuangan pemda yang diperlukan dalam rangka pengembangan SIKRI
- Telah dikembangkan MP SIKRI di level pelaporan dengan menginput data LKPD secara manual dan mengonsolidasikannya secara otomatis dengan LKPP Tingkat Wilayah dalam platform SPAN
- Telah dilakukan Piloting Modul Pelaporan SIKRI pada Kanwil DJPb pada bulan Agustus dan November 2020

Isu Strategis

- RPP BAS Pemerintah daerah belum ditetapkan sehingga belum dapat diketahui sejauh mana penerapan BAS pada SIPD Kemendagri pada tahun depan yang akan berpengaruh ke SIKD dan SIKRI
- Penyelarasan pengembangan SIKD dengan SIKRI antara lain
 - Interkoneksi data transaksi dari SIKD ke SIKRI pada tahun 2021
 - Pemenuhan kebutuhan database untuk menampung data informasi keuangan daerah

Next Steps (2021)

- Koordinasi DJPb dengan DJPK untuk membahas pending matters dalam penyelarasan BAS, interkoneksi data dan penyediaan data guna penyelarasan pengembangan SIKD dan SIKRI
- Penyelesaian penyusunan blueprint dan BDAT Integrasi Informasi Keuangan Pempus dan pemda dan pembahasan blueprint BDAT dengan stakeholders
- Penetapan dasar hukum SIKRI sebagai platform integrasi keuangan Pemerintah Pusat dan Pemda
- Penyusunan draft BAS Konsolidasian
- Penyediaan SIKRI di tingkat Laporan
- Capacity Building terkait financial statement analysis/data analysis dan business intelligence
- Penyediaan data neraca keuangan pusat dan daerah untuk analisis kebijakan fiskal

IS 14 Integrasi Proses Bisnis Perencanaan dan Penganggaran

TUJUAN

Meningkatkan efektivitas dan efisiensi perencanaan dan penganggaran dalam pengelolaan keuangan negara.

Capaian 2020

- Target milestone 2020 telah diselesaikan melalui integrasi dashboard IKPA dan EKA pada yang disajikan pada aplikasi SMART dan OMSPAN melalui metode pertukaran data (data interchange) secara host to host
- Informasi integrasi dashboard tersebut telah disampaikan para Kepala Kanwil dan KPPN untuk selanjutnya disosialisasikan kepada mitra kerjanya melalui ND-766/PB.2/2020 tanggal 24 September 2020 hal integrasi Data IKPA pada Aplikasi Omspan dengan EKA pada Aplikasi SMART dalam rangka Monev Kinerja Anggaran
- Modul Anggaran SAKTI Satker sudah diimplementasikan dan sudah dilaporkan pada weekly SAKTI bulan November 2020

Isu Strategis

- Potensi perbedaan detail data pagu dan penyerapan anggaran untuk indikator Penyerapan Anggaran pada IKPA OMSPAN dan EKA SMART karena lag pengiriman data melalui SLDK
- Ketergantungan proses perolehan data capaian output melalui mekanisme rekonsiliasi menggunakan aplikasi e-Rekon&LK yang aksesnya dibatasi jadwal open dan close periode laporan keuangan

Next Steps (2021)

Pengembangan dan peralihan proses Monitoring dan Konfirmasi Data Capaian output dari sebelumnya melalui e-Rekon & LK ke aplikasi OMSPAN

2

Quickwins

DJPb

9

Highlight Capaian Quickwins DJPb Desember 2020

DONE

NO	QUICKWINS	PROGRES	UIC
1.	Optimalisasi dan Pemanfaatan BMN Secara Efektif dan Efisien	100,00%	Setditjen
2.	Otomasi Maksimum Pencairan (MP) PNBPN Terpusat Fase II	100,00%	Dit PA
3.	Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) pada Kantor Perwakilan RI di Luar Negeri	100,00%	
4.	Simplifikasi Pengelolaan Rekening Pemerintah	100,00%	Dit PKN & SITP
5.	<i>Piloting</i> Penggunaan UP melalui Sistem Digital <i>Payment-Marketplace</i> pada Satker K/L	100,00%	Dit PKN
6.	Digitalisasi <i>Impact Analysis</i> Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) (<i>Endline</i>)	100,00%	Dit SMI
7.	BLU Simpel: Integrasi dan Simplifikasi Tata Kelola BLU	100,00%	Dit PPK BLU & SP
8.	BLU <i>Integrated Online System 2.1</i> : Digitalisasi Pengelolaan BLU	100,00%	Dit PPK BLU & SITP
9.	Kerangka Penguatan Konsolidasi Statistik Fiskal Nasional (GFS)	100,00%	Dit APK
10.	Modul Pelaporan – SIKRI	100,00%	Dit APK & SITP
11.	Simplifikasi Peraturan di Bidang Perbendaharaan Fase I	100,00%	Dit SP
12.	Penyelesaian Rekomendasi Pengangkatan Pejabat Fungsional di Bidang Perbendaharaan pada Kementerian Negara/ Lembaga	100,00%	Dit SP & SITP
13.	Aplikasi Gaji berbasis Web	100,00%	Dit SITP

Pasti Lebih Baik

Lampiran

Detail capaian per masing-masing *Quickwins*

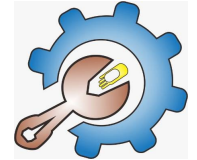


Quickwins 2020

100%

Capaian

Optimalisasi dan Pemanfaatan BMN Secara Efektif dan Efisien



Tujuan: Mendayagunakan BMN baik yang sudah tidak digunakan (idle) dan/atau yang masih digunakan tapi sudah tidak sesuai dengan tugas dan fungsi

Acceptance Criteria

- Laporan Inventarisasi BMN yang kurang optimal digunakan satker
- Tindak lanjut pelaksanaan kebijakan optimalisasi/pemanfaatan seperti usulan sewa, proses pinjam pakai atau alih status dan sebagainya.
- Piloting pelaksanaan optimalisasi pada Kantor Pusat DJPb
- Penetapan kebijakan teknis pelaksanaan optimalisasi di lingkungan DJPb

Keterangan Capaian

- Piloting kantor pusat, reutilisasi sudah 100 %, hibah telah selesai didistribusikan + 1.000 unit BMN kepada 18 lembaga sosial masyarakat
- Pembentukan piloting TSO di KPPN Bogor
- Penanganan aset non free and clear sebagian dalam tahap mediasi sebagai respon atas somasi I
- Kantor pusat memperoleh juara ke I kompetisi optimalisasi pemanfaatan BMN di lingkungan Kementerian Keuangan, Kanwil DJPB Prov. Jabar juara I kategori ketertiban dan Kanwil DJPB Prov. Kaltim juara II kategori best overall
- Ditetapkan SE Dirjen Perbendaharaan No. SE-129/PB/2020 tgl 30 Desember 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Optimalisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Negara di Lingkungan Ditjen Perbendaharaan

Kegiatan	Target	Progres	Bobot
Menyusun kajian pelaksanaan optimalisasi	Feb-Mar	100%	10%
Pelaksanaan inventarisasi	Feb-Jun	100%	30%
<i>Piloting</i> pelaksanaan optimalisasi pada kantor pusat	Feb-Nov	100%	10%
<i>Developing</i> sistem pendukung pelaksanaan optimalisasi	Mar-Jun	100%	20%
Tindak lanjut pelaksanaan kebijakan optimalisasi	Jul-Agt	100%	20%
Penetapan kebijakan teknis pelaksanaan optimalisasi	November-Desember	100%	10%

Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Quickwins 2020

100%

Capaian

Otomasi Maksimum Pencairan (MP) PNBP Terpusat Fase II



Tujuan: Mewujudkan mekanisme pelaksanaan anggaran belanja PNBP yang efisien dan efektif

Acceptance Criteria

- Penetapan kebijakan pendukung terkait implementasi Otomasi Maksimum Pencairan (MP) PNBP Terpusat
- Penyelesaian pengembangan aplikasi pendukung
- Implementasi (piloting dan roll out) otomasi MP PNBP Terpusat

Keterangan Capaian

- Telah ditetapkan PER-21/PB/2020 27 Oktober 2020 Tentang Mekanisme Penetapan Maksimum Pencairan Penerimaan Negara Bukan Pajak Secara Elektronik
- Telah ditetapkan KEP-262/PB/2020 17 November 2020 tentang Penetapan Sekretariat Jenderal Kementerian ATR/BPN dan Dirjen Hubla Kemenhub dalam Penerapan Modul MP-PNBP Terpusat Secara Elektronik (Piloting Tahap I)
- Telah ditetapkan KEP-274/PB/2020 30 November 2020 tentang Penetapan Ditjen Bimas Islam, Ditjen Perhubungan Udara dan Ditjen Perhubungan Darat dalam Penerapan Modul MP-PNBP Terpusat Secara Elektronik (Piloting Tahap II)
- Telah dilaksanakan *Launching* Modul MP PNBP Terpusat pada tgl 30 November 2020 (saat pelaksanaan kegiatan sosialisasi PER-21/PB/2020 ke K/L)

Kegiatan	Target	Progres	Bobot
Pembentukan tim dan pengajuan <i>user requirement</i>	Januari	100%	5%
Pembahasan draf <i>peraturan</i> otomasi MP PNBP	Feb-Okt	100%	10%
Pembangunan Sistem Otomasi MP PNBP			
a. Perancangan desain analisis <i>system</i>	Januari	100%	5%
b. <i>Developing database</i> sistem program aplikasi	Feb-Agt	100%	30%
c. Ujicoba dan penyempurnaan sistem (UAT Sistem Otomasi MP PNBP)	September	100%	10%
d. Interkoneksi dengan SPAN/SAS/SAKTI	Jul-Sep	100%	10%
e. Finalisasi sistem otomasi	Oktober	100%	5%
<i>Piloting</i> Tahap I	Oktober	100%	10%
<i>Piloting</i> Tahap II	Oktober	100%	10%
<i>Launching</i> Sistem Otomasi MP PNBP	November	100%	5%

Direktorat Pelaksanaan Anggaran

Quickwins 2020

100%

Capaian

Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) pada Kantor Perwakilan RI di Luar Negeri



Tujuan: Mendukung pengelolaan likuiditas keuangan negara dengan instrumen keuangan modern

Acceptance Criteria

1. Adanya peraturan tentang uji coba implementasi KKP di satuan kerja di luar negeri
2. Adanya 15 PKS antara bank penerbit KKP dengan pihak Kementerian Luar Negeri
3. Penggunaan KKP pada 15 satker perwakilan di Luar Negeri

Keterangan Capaian :

- Terdapat 22 Perwakilan RI yang telah melaksanakan serah terima KKP antara KPA dan Pemegang KKP, 6 Perwakilan dari mitra BRI, 9 Perwakilan mitra Bank Mandiri dan 7 Perwakilan mitra BNI
- Pelaksanaan pembayaran menggunakan KKP telah dilaksanakan 15 Perwakilan RI (bertambah 11 perwakilan dari bulan sebelumnya)
- Terdapat 5 Perwakilan RI yang KKP-nya dapat diterima oleh merchant luar negeri
- Terdapat 4 Perwakilan RI yang KKP-nya belum dapat diterima oleh merchant
- Terdapat 6 Perwakilan RI telah menggunakan KKP namun terkendala PIN KKP
- Kendala telah ditangani bank penerbit KKP dan tahun 2021 penggunaan KKP dapat dilanjutkan kembali

Kegiatan	Target	Progres	Bobot
Rapat finalisasi draf Perdirjen KKP pada Kantor Perwakilan RI di Luar Negeri	Januari	100%	5%
Penerbitan Perdirjen KKP pada Satker Perwakilan RI di Luar Negeri	Februari	100%	20%
Koordinasi dengan Setjen Kemlu terkait usulan Satker Perwakilan RI di LN pelaksana uji coba KKP	Februari	100%	5%
Penerbitan Kepdirjen terkait Satker Perwakilan RI di LN pelaksana uji coba KKP	Maret	100%	15%
Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Satker pelaksana uji coba KKP	Mar-Agt	100%	15%
Penerbitan dan pengiriman KKP ke Kantor Perwakilan RI di Luar Negeri	Apr-Sep	100%	15%
Serah terima KKP dari KPA kepada Pemegang KKP	November	100%	5%
Pelaksanaan pembayaran dengan menggunakan KKP pada 15 Satker Perwakilan RI di LN	November	100%	20%

Direktorat Pelaksanaan Anggaran

Quickwins 2020

100%

Capaian

Simplifikasi Pengelolaan Rekening Pemerintah



Tujuan : Mengurangi jumlah rekening pemerintah dalam bentuk giro

Acceptance Criteria

1. Implementasi PMK 183/PMK.05/2019 pada Kementerian/Lembaga
2. Rekening Bendahara Pengeluaran dalam bentuk giro berkurang 50%
3. Terbangunnya aplikasi SPRINT 2.0

Keterangan Capaian

- Implementasi Restrukturisasi Rekening Pengeluaran tahap 1 untuk lingkup Kemenkeu telah selesai, tahap 2 untuk Satker lingkup K/L yang tidak memiliki unit vertikal di daerah dan tahap 3 untuk seluruh K/L sedang berproses
- Rekening induk telah dibuka pada 86 K/L, rekening satker yang telah disetujui pada 86 K/L, rekening Bendahara Pengeluaran telah dipooling pada 746 rekening induk, dan bank yang telah memenuhi requirement sebanyak 7 bank
- Aplikasi SPRINT 2.0 telah disusun user requirement dan UAT host to host
- Update Source aplikasi dan database sudah diselesaikan di Pusintek

Direktorat Pengelolaan Kas Negara & Sistem Informasi Dan Teknologi Perbendaharaan

Quickwins 2020

100,00%

Capaian

Simplifikasi Pengelolaan Rekening Pemerintah



Tujuan: Mengurangi jumlah rekening pemerintah dalam bentuk giro

Kegiatan – Dit. PKN (70%)	Target	Progres	Bobot
Penyusunan <i>User Requirement</i> aplikasi SPRINT 2.0	Jan-Jun	100%	5%
Implementasi Restrukturisasi Rekening Pengeluaran tahap 1 untuk Satker lingkup Kementerian Keuangan	Jan-Jun	100%	10%
Implementasi Restrukturisasi Rekening Pengeluaran tahap 2 untuk Satker lingkup Kementerian Negara/Lembaga yang tidak memiliki unit vertikal di daerah	Jan-Des	100%	15%
Implementasi Restrukturisasi Rekening Pengeluaran tahap 3 utk seluruh Satker Kementerian Negara/Lembaga	Jan-Des	100%	15%
<i>Monitoring</i> pelaksanaan & evaluasi penerapan Rekening Induk & Rekening Satker tahap 1 u/ Satker Kemenkeu	Feb-Jun	100%	10%
Pembahasan dan penyampaian <i>User Requirement</i> aplikasi SPRINT 2.0 dengan pengembang	Juni	100%	5%
Pengembangan aplikasi SPRINT 2.0	Apr-Jul	100%	10%
<i>Monitoring</i> pelaksanaan dan evaluasi penerapan Rekening Induk dan Rekening Satker tahap 2 untuk Satker lingkup Kementerian Negara/Lembaga yang tidak memiliki unit vertikal di daerah	Jun-Des	100%	10%
<i>User Acceptance Test</i> aplikasi SPRINT versi 2.0	Agustus	100%	5%
<i>Monitoring</i> pelaksanaan dan evaluasi penerapan Rekening Induk dan Rekening Satker tahap 3 untuk seluruh Satker lingkup Kementerian Negara/Lembaga	Okt-Des	100%	10%
Konsolidasi rekening pemerintah pada aplikasi SPRINT 2.0	Desember	100%	5%

Global

100%

Kegiatan – Dit. SITP (30%)	Target	Progres	Bobot
Perancangan perubahan <i>database</i> SPRINT, proses pembukaan rekening pada Aplikasi SPRINT, perubahan <i>Dashboard</i> dan <i>Monitoring</i> untuk mengakomodir Simplifikasi	Februari	100%	15%
Penyesuaian <i>template</i> aplikasi SPRINT agar sesuai dengan DIGIT, penambahan level <i>user</i> dan perbaikan <i>Setting User</i>	Maret	100%	15%
Pembuatan tabel, penambahan kolom <i>table</i> pada <i>database</i> SPRINT	Maret	100%	10%
Perbaikan Perekaman Rekening Semua Level, Pembuatan <i>Dashboard</i> , Perekaman Referensi, Penambahan <i>Monitoring</i> , <i>Approval</i> Pembukaan Rekening dan menampilkan rekonsiliasi data rekening pada Aplikasi SPRINT	Juli	100%	30%
Penambahan menu <i>upload</i> bukti setor jasa giro (jasa giro, kekurangan, dan denda) serta rekening Koran, Penambahan Menu Laporan Perhitungan Jasa Giro ada rekap untuk keseluruhan Bank, dan Penambahan Fitur agar <i>Host to Host</i> bisa mengetahui saldo konsolidasi secara <i>realtime</i> atau <i>scheduler</i> dan memiliki fungsi untuk langsung mengetahui bahwa rekening sudah dibuka maupun ditutup oleh satker	Oktober	100%	20%
Berkoordinasi dengan Pusintek, Pelaksanaan <i>Deploy Database</i> dan Aplikasi di Pusintek	Oktober	100%	10%
Global		100%	

Direktorat Pengelolaan Kas Negara & Sistem Informasi Dan Teknologi Perbendaharaan

Quickwins 2020

100%

Capaian

Piloting Penggunaan UP melalui Sistem Digital Payment-Marketplace pada Satker K/L



Tujuan: Mewujudkan ekosistem antara satuan kerja, penyedia barang/jasa, perbankan, dan kuasa BUN

Acceptance Criteria

1. Seluruh Satker KPPN, Kanwil dan Kantor Pusat DJPb telah melaksanakan ujicoba
2. Seratus Satuan Kerja pada Kementerian/Lembaga di luar DJPb ditetapkan sebagai satker peserta ujicoba melalui surat Direktur Pengelolaan Kas Negara

Keterangan Capaian

- Permintaan Usulan Peserta Uji Coba Sistem Marketplace dan Digital Payment disampaikan melalui Nota Dinas Direktur Pengelolaan Kas Negara No.ND-1087/PB.3/2020 tanggal 3 September 2020 dan ND-1121/PB.3/2020 tanggal 14 September 2020
- Telah ditetapkan 241 satker peserta uji coba marketplace di luar DJPb melalui surat Direktur Pengelolaan Kas Negara Nomor S-613/PB.3/2020 tanggal 30 September 2020
- Hasil monev pelaksanaan uji coba penggunaan UP melalui *Digital Payment-Marketplace* tahap I-IV disampaikan melalui Nota Dinas Direktur PKN No. ND-1590/PB.3/2020 4 Desember 2020.
- Validasi user *Marketplace* dengan user SAKTI dan mapping CoA per PPK diusulkan untuk pengembangan interkoneksi SAKTI - Marketplace tahap II

Kegiatan	Target	Progres	Bobot
TOT Aplikasi <i>Marketplace</i> dan <i>Digital Payment</i>	Februari	100%	20%
Rollout Ujicoba Sistem <i>Marketplace</i> dan <i>Digital Payment</i> pada Satuan Kerja Lingkup DJPb	Maret	100%	15%
KPPN melakukan pelatihan Aplikasi <i>Marketplace</i> & <i>Digital Payment</i> pd satker K/L wilayah kerjanya	Jul-Agt	100%	20%
KPPN mengusulkan satker wilayah kerjanya yg siap menjadi peserta ujicoba penggunaan UP melalui sistem <i>Marketplace-Digital Payment</i>	Sep-Okt	100%	15%
Penetapan satker peserta ujicoba penggunaan UP melalui sistem <i>Marketplace-Digital Payment</i>	November	100%	20%
Monev pelaksanaan ujicoba penggunaan UP melalui sistem <i>Marketplace-Digital Payment</i> pada satker K/L	Desember	100%	10%

Direktorat Pengelolaan Kas Negara

Quickwins 2020

100%
Capaian

Digitalisasi *Impact Analysis* Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) (*Endline*)



Tujuan: Melaksanakan evaluasi atas pembiayaan Ultra Mikro kepada debitur

Acceptance Criteria

1. Pelaksanaan Survei Endline
2. Laporan Uji Dampak

Keterangan Capaian

- Laporan Uji Dampak telah selesai dan disampaikan kepada Dirjen Perbendaharaan melalui Nota Dinas Direktur SMI No. ND-1055/PB.4/2020 26 November 2020
- Dilaksanakan Workshop dan Pemaparan Kajian Uji Dampak Pembiayaan UMi 30 November 2020
- Hasil analisis uji dampak serta saran yang diterima dari narasumber dan peserta workshop menjadi masukan dalam pengembangan kebijakan pembiayaan UMi ke depannya

Kegiatan	Target	Progres	Bobot
Pengembangan fitur <i>endline</i> SIKP UMi	Jan-Feb	100%	10%
Pelaksanaan bimtek kepada operator KPPN	Februari	100%	10%
Verifikasi dan perbaikan data <i>baseline</i> 2019	Mar-Apr	100%	5%
Survei dan perekaman <i>endline</i> SMT1 2020 oleh KPPN	Mei-Nov	100%	40%
Rekapitulasi dan analisis data, penyusunan <i>preliminary report</i> uji dampak	Agt-Sep	100%	5%
FGD diseminasi hasil uji dampak	Oktober	100%	15%
Finalisasi laporan uji dampak	Nov-Des	100%	15%

Direktorat Sistem Manajemen Investasi

Quickwins 2020

100%

Capaian

BLU Sempel: Integrasi & Simplifikasi Tata Kelola BLU



Tujuan: Regulasi BLU yang simpel mudah pahami secara utuh dengan substansi yang aktual sesuai dengan perkembangan BLU

Acceptance Criteria

Diundangkannya PMK Pedoman Pengelolaan BLU (BLU Sempel)

Keterangan Capaian

- Telah ditetapkan dan diundangkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum tanggal 18 September 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);
- Telah dilaksanakan Webinar BLU Tumbuh dan Menumbuhkan pada tanggal 22 Oktober 2020;
- Telah dilaksanakan Pembelajaran E-Learning Dewan Pengawas Badan Layanan Umum (BLU) Angkatan I dan II Tahun Anggaran 2020 diselenggarakan selama sepuluh hari kerja pada bulan Oktober dan November 2020 secara daring melalui Kemenkeu Learning Center.
- Bulan November 2020 telah melaksanakan Webinar BLU Series sebanyak 4 seri, yaitu:
 - Penguatan Tata Kelola dan Pengawasan BLU (12 November 2020)
 - Transparansi dan Optimalisasi Kas BLU (17 November 2020)
 - Optimalisasi Pengelolaan Aset pada BLU (23 November 2020)
 - Tarif dan Remunerasi BLU (26 November 2020)

Kegiatan	Target	Progres	Bobot
Penyusunan Draf, Pendalaman Substansi dan Drafting serta Pembuatan DIM (Daftar Inventarisasi Masalah)	Januari	100%	20%
Pembahasan Internal Kemenkeu	Jan-Mar	100%	15%
Pembahasan Eksternal Kemenkeu (Dewan Pengawas, Kementerian/Lembaga, dan BLU)	Feb-Mei	100%	15%
Finalisasi Pembahasan dengan Biro Hukum dan DSP	Jun-Jul	100%	20%
Penyiapan Berkas Pengajuan RPMK	Agustus	100%	10%
Pengajuan RPMK	September	100%	10%
Proses Penetapan	Oktober	100%	10%

Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum & Sistem Perbendaharaan

Quickwins 2020

100%
Capaian

BLU *Integrated Online System 2.1*: Digitalisasi Pengelolaan BLU



Tujuan : Otomasi proses bisnis pengelolaan BLU dengan menggunakan aplikasi BIOS untuk penghitungan unit cost usulan tarif BLU dan penyempurnaan modul penilaian kinerja Satker BLU

Acceptance Criteria

- Modul tarif dengan perhitungan unit cost dan Pengelolaan Kinerja lulus Quality Assurance (QA) di PUSINTEK
- Penyelesaian User Acceptance Test (UAT) Modul Tarif dengan perhitungan unit cost dan Pengelolaan Kinerja

Keterangan Capaian

- Pelaksanaan User Acceptance Test (UAT) Modul Tarif dan Modul Pengelolaan Kinerja dilaksanakan secara marathon pada tanggal 5 s.d. 15 Desember 2020
- Hasil dari pelaksanaan UAT masih terdapat beberapa temuan yang dilakukan perbaikan s.d. tanggal 27 Desember 2020
- Tanggal 28 Desember 2020, Tim Pengembang menyampaikan permohonan Quality Assurance (QA) Modul Tarif dan Modul Pengelolaan Kinerja kepada Pusintek dengan Nomor Tiket 377535 [C] [APL] Permintaan QA dan Pull Image BIOS

Direktorat PPK BLU & SITP

Quickwins 2020

100%
Capaian

BLU Integrated Online System 2.1: Digitalisasi Pengelolaan BLU



Tujuan: Otomasi proses bisnis pengelolaan BLU dengan menggunakan aplikasi BIOS untuk penghitungan unit cost usulan tarif BLU dan penyempurnaan modul penilaian kinerja Satker BLU

Kegiatan – Dit. PPK BLU (70%)				Target	Progres	Bobot
Penyusunan UR Modul BIOS 2.1	Jan-Sep	100%	20%			
Penyusunan dan penyampaian UR Aplikasi RinDU versi Android	April	100%	10%			
Pengembangan Aplikasi RinDU	Mei-Juni	100%	20%			
QA dan UAT Aplikasi RinDU	Juni	100%	10%			
Publish dan Bimtek Aplikasi RinDU	Juli	100%	5%			
Pembahasan UR Modul Tarif dan Pengelolaan Kinerja	September	100%	10%			
Pengembangan Modul BIOS	Sep-Nov	100%	20%			
QA dan UAT	November	100%	5%			
Global			100%			

Kegiatan – Dit. SITP (30%)				Target	Progres	Bobot
Asistensi Penyusunan UR Modul BIOS 2.1	Jan-Sep	100%	10%			
Pengembangan Aplikasi RinDU	Mei-Jun	100%	30%			
QA dan UAT Aplikasi RinDU	Juni	100%	10%			
Publish Aplikasi RinDU	Juli	100%	5%			
Pembahasan UR Modul Tarif dan Pengelolaan Kinerja	September	100%	10%			
Pengembangan Modul Tarif dan Pengelolaan Kinerja	Sep-Nov	100%	30%			
QA dan UAT Tarif dan Pengelolaan Kinerja	November	100%	5%			
Global			100%			

Direktorat PPK BLU & SITP

Quickwins 2020

100%

Capaian

Kerangka Penguatan Konsolidasi Statistik Fiskal Nasional (GFS)



Tujuan: Menyiapkan panduan pelaksanaan rekonsiliasi data statistik fiskal antara DJPb Kemenkeu dan Departemen Statistik Bank Indonesia untuk mendapatkan data statistik keuangan Sektor Pemerintah Umum yang akurat dan konsisten antara dua instansi

Acceptance Criteria

- Terwujudnya Panduan Rekonsiliasi GFS – FABS tingkat nasional
- Pelaksanaan Uji Coba Rekonsiliasi GFS – FABS tingkat nasional

Keterangan Capaian :

- Telah dilaksanakan pembahasan draft perdirjen Juknis rekon bersama tim Legal Drafting DJPB (HPP DSP, dan OTL Sesditjen) secara daring
- Telah dilaksanakan Pertemuan secara daring dalam rangka penyelarasan produk hukum BI terhadap perdirjen juknis rekon yang melibatkan tim hukum dari Kemenkeu

Kegiatan	Target	Progres	Bobot
Pembahasan draf panduan petunjuk teknis pelaksanaan rekonsiliasi data statistik fiskal nasional antara DJPb dan Departemen Statistik BI	Jan-Agt	100%	30%
Pembahasan Draf Perdirjen panduan petunjuk teknis pelaksanaan rekonsiliasi data statistik fiskal di internal DJPb	Agt-Sep	100%	20%
Uji coba pelaksanaan rekonsiliasi data statistik fiskal di tingkat nasional	Oktober	100%	20%
Finalisasi draf panduan petunjuk teknis pelaksanaan rekonsiliasi data statistik fiskal berdasarkan hasil uji coba	November	100%	10%
Penetapan panduan petunjuk teknis pelaksanaan rekonsiliasi data statistik fiskal	November	100%	20%

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Quickwins 2020

100%

Capaian

Modul Pelaporan - SIKRI



Tujuan: Menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Umum terintegrasi dengan SPAN

Acceptance Criteria

1. LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat)
2. LKPKD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian)
3. LKPK (Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian)
4. LSKPU (Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Umum)

Keterangan Capaian :

Dit. APK

- Telah disampaikan rawset Modul Pelaporan SIKRI kepada Dit. SITP dan telah ditanam dalam SPAN
- Telah dilakukan uji coba menu LSKP dengan menggunakan data Nasional
- Telah dilaksanakan transfer knowledge lanjutan daring kepada peserta Piloting Tahap II 05 November 2020, diikuti Kanwil Aceh, Jawa Tengah, dan Papua
- Telah dilakukan piloting ketiga Kanwil di atas dan masing-masing bisa mengikuti sesuai dengan kapasitas masing-masing
- Telah disampaikan daftar permasalahan dari Kanwil kepada Dit. SITP dan sebagian telah diselesaikan

Dit. SITP

- Progres monitoring dan evaluasi bergantung ada tidaknya change request (CR) dari pemilik proses bisnis, sampai dengan akhir November 2020 tidak ada CR dari pemilik probis, sehingga kegiatan monev telah selesai.
- Program yang dikembangkan telah selesai melewati masa piloting tahun 2020 dan tidak ada perubahan atas pengembangan program dimaksud, maka monitoring atas pengembangan Modul Pelaporan tahun 2020 berjalan dengan baik dan dari evaluasi yang dilakukan tidak ditemukan perubahan atas program Modul Pelaporan serta terdapat incident atas aplikasi yang wajar yang bisa diselesaikan tanpa merubah program yang ada

Direktorat APK & SITP

Quickwins 2020

100%

Capaian

Modul Pelaporan - SIKRI



Tujuan: Menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Umum terintegrasi dengan SPAN

Kegiatan – Dit. APK (70%)	Target	Progres	Bobot
<i>Development</i>	Jan-Mar	100%	30%
<i>Functional Test</i>	Apr-Mei	100%	10%
<i>User Acceptance Test (UAT)</i>	Mar-Mei	100%	30%
<i>Performance Test</i>	Agt-Sep	100%	10%
<i>Training & Transfer Knowledge</i>	Jun-Sep	100%	5%
<i>Deployment & Release</i>	Jun	100%	10%
<i>Monitoring & Evaluation</i>	Jan-Des	100%	5%
Global		100%	

Kegiatan – Dit. SITP (30%)	Target	Progres	Bobot
<i>Development</i>	Januari	100%	30%
<i>Functional Test</i>	Februari	100%	10%
<i>User Acceptance Test (UAT)</i>	Juni	100%	30%
<i>Performance Test</i>	Juni	100%	10%
<i>Training & Transfer Knowledge</i>	Juni	100%	5%
<i>Deployment & Release</i>	Juni	100%	10%
<i>Monitoring & Evaluation</i>	Jan-Des	100%	5%
Global		100%	

Direktorat APK & SITP

Quickwins 2020

100% Capaian Simplifikasi Peraturan di Bidang Perbendaharaan Fase I



Tujuan : Mengurangi kuantitas peraturan di bidang perbendaharaan agar menjadi lebih efektif, lebih mudah dipahami dan lebih mudah diimplementasikan

Acceptance Criteria

Berkurangnya kuantitas penerbitan peraturan di bidang perbendaharaan pada tahun 2020 sebanyak 50%

Keterangan Capaian:

Dari 12 RPMK, 8 RPMK telah selesai, 4 RPMK dihapuskan dari progsun

Kegiatan	Target	Progres	Bobot
Identifikasi peraturan di bidang perbendaharaan yg akan dilakukan simplifikasi dan melakukan koordinasi dgn UE II DJPb selaku unit pemrakarsa peraturan, bersama unit terkait lainnya	Jan-Feb	100%	20%
Monitoring atas pelaksanaan simplifikasi peraturan perbendaharaan pd setiap UE II lingkup DJPb Smt I 2020	Mar-Jun	100%	25%
Koordinasi dgn UE II DJPb selaku unit pemrakarsa atas pelaksanaan pd Smt I 2020, bersama unit terkait lainnya; identifikasi & koordinasi atas peraturan perbendaharaan yg akan dilakukan simplifikasi pd Smt II 2020 oleh UE II DJPb pemrakarsa peraturan, bersama unit terkait lainnya	Juli	100%	15%
Monitoring atas pelaksanaan simplifikasi peraturan perbendaharaan pd setiap UE II DJPb Smt II 2020	Agt-Nov	100%	25%
Koordinasi dengan UE II DJPb selaku unit pemrakarsa peraturan atas pelaksanaan pada Smt II 2020, bersama unit terkait lainnya	Desember	100%	15%

Direktorat Sistem Perbendaharaan

Quickwins 2020

100%
Capaian

Penyelesaian Rekomendasi Pengangkatan Pejabat Fungsional di Bidang Perbendaharaan pada Kementerian Negara/Lembaga



Tujuan: Mewujudkan implementasi jabatan fungsional di bidang perbendaharaan pada Kementerian Negara/Lembaga

Acceptance Criteria

Pengangkatan pejabat pengelola perbendaharaan dalam jabatan fungsional di bidang perbendaharaan (target 250 orang)

Keterangan Capaian :

- Telah diterbitkan 38 rekomendasi formasi Jabatan Fungsional bidang perbendaharaan oleh DSP dari 38 K/L yang mengusulkan formasi ke DSP
- Telah atau sedang berlangsung seleksi inpassing pada 23 K/L dari 23 K/L yang telah ditetapkan formasi oleh KemenPANRB
- Telah diterbitkan 9 rekomendasi pengangkatan Jabatan Fungsional bidang perbendaharaan oleh DSP dari 9 K/L yang mengusulkan peserta inpassing ke DSP
- Telah dilakukan pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional bidang perbendaharaan melalui inpassing sebanyak 288 orang dari target sebanyak 250 orang

Kegiatan	Target	Progress	Bobot
Pengumuman pendaftaran seleksi <i>inpassing</i>	Januari	100%	5%
Pelatihan Pembina Jabatan Fungsional kepada KPPN	Jan-Mar	100%	15%
Penerbitan rekomendasi formasi jabatan fungsional oleh DSP	Jan-Okt	100%	25%
Penyelenggaraan seleksi <i>inpassing</i>	Feb-Okt	100%	30%
Pelatihan/ <i>workshop</i> instansi pengguna jafung	Maret	100%	15%
Penerbitan rekomendasi pengangkatan jabatan fungsional oleh DSP	Mar-Okt	100%	5%
Pengangkatan ke jabatan fungsional di bidang perbendaharaan (target 250 orang)	Mei-Okt	115,2%	5%

Direktorat Sistem Perbendaharaan dan Sistem Informasi Dan Teknologi Perbendaharaan

Quickwins 2020

100%

Capaian

Aplikasi Gaji Berbasis Web



Tujuan: Memberikan kemudahan akses dalam mengelola data gaji para pegawai di lingkungan satuan kerja karena berbasis web

Acceptance Criteria

1. Aplikasi dapat digunakan untuk memproses daftar gaji oleh satuan kerja Piloting
2. Aplikasi dapat dihubungkan dengan aplikasi kepegawaian dalam rangka updating data untuk memproses gaji

Keterangan Capaian :

- Aplikasi sudah release di server production dan siap untuk digunakan
- Rekonsiliasi data sudah mencapai 100%
- Aplikasi gaji telah berhasil menghasilkan perhitungan gaji dengan data update melalui aplikasi HRIS

Kegiatan	Target	Progres	Bobot
Perancangan dan Persiapan <i>Environment Development</i>	Februari	100%	10%
Pengembangan Aplikasi dan Buku Panduan (<i>Aplikasi + Host to Host</i>)	Mar-Jul	100%	50%
<i>Functional Test</i>	Agustus	100%	10%
User Acceptance Test (UAT)	September	100%	5%
<i>Performance Test</i>	September	100%	5%
<i>Training and Transfer of Knowledge</i>	Oktober	100%	5%
Rekonsiliasi Data Pegawai Detail dengan HRIS	November	100%	5%
<i>Deployment and Release</i>	November	100%	5%
<i>Monitoring and Evaluation</i>	Desember	100%	5%

Direktorat Sistem Informasi Dan Teknologi Perbendaharaan